

JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA *(Indonesian Fisheries Policy Journal)*



**PUSAT RISET PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

J.Kebijak.Perikan.ind.	Vol. 9	No. 1	Page 1-60	Mei 2017	p-ISSN 1979-6366	e-ISSN 2502-6550
------------------------	--------	-------	-----------	-------------	---------------------	---------------------

JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

Volume 9 Nomor 1 Mei 2017

Nomor Akreditasi : 626/AU2/P2MI-LIPI/03/2015
(Periode April 2015 – April 2018)

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia adalah wadah informasi perikanan, baik laut maupun perairan umum daratan. Jurnal ini menyajikan analisis dan sintesis hasil-hasil penelitian, informasi, dan pemikiran dalam kebijakan kelautan dan perikanan.

Terbit pertama kali tahun 2009, dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan:
MEI dan NOVEMBER.

Ketua Penyunting:

Prof. Dr. Ali Suman (Sumberdaya dan Lingkungan-Balai Riset Perikanan Laut)

Anggota Penyunting:

Dr. Wijopriyono (Hidro Akustik Perikanan-Pusat Riset Perikanan)

Dewan Penyunting:

Prof. Dr. Ir. Wudianto, M.Sc. (Teknologi Penangkapan Ikan-Pusat Riset Perikanan)

Prof. Dr. Ir. Zahri Nasution, M.Sc. (Sosiologi Perikanan-Pusat Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)

Dr. Ir. Tri Wiji Nurani (Analisis Sistem pada bidang Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan-Institut Pertanian Bogor)

Dr. Ir. Andin Taryoto, M.Si. (Sosiologi Perikanan-Sekolah Tinggi Perikanan)

Dr. Anang Hari Kristanto (Pemuliaan Ikan-Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan)

Editing Bahasa:

Andhika Prima Prasetyo, M.Sc.

Penyunting Pelaksana:

Dra. Endang Sriyati

Arief Gunawan, S. Kom.

Administrasi:

Darwanto, S.Sos.

Amalia Setiasari, A.Md.

Alamat Redaksi/Penerbit:

Pusat Riset Perikanan

Gedung Balitbang KP II, Jl. Pasir Putih II, Ancol Timur, Jakarta Utara-4430

Telp. (021) 64700928, Fax. (021) 64700929

Website: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>

e-mail: jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia diterbitkan oleh Pusat Riset Perikanan-Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LEMBAR INDEKSASI

FOKUS DAN RUANG LINGKUP JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>) memiliki p-ISSN 1979-6366; e-ISSN 2502-6550 dengan Nomor Akreditasi: 626/AU2/P2MI-LIPI/03/2015 (periode April 2015-April 2018). Terbit pertama kali tahun 2009, dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan November.

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia menyajikan analisis dan sintesis hasil-hasil penelitian, informasi dan pemikiran dalam kebijakan kelautan dan perikanan.

Naskah yang masuk ke Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia akan dicek mengenai pedoman penulisannya oleh Administrasi, apabila sudah sesuai akan direview oleh 2 (dua) orang Dewan Penyunting dan 1 (satu) orang Bebestari (Peer-Reviewer) berdasarkan penunjukan dari Ketua Dewan Penyunting. Keputusan diterima atau tidaknya suatu naskah menjadi hak dari Ketua Dewan Penyunting berdasarkan atas rekomendasi dari Dewan Penyunting dan Bebestari.

INFORMASI INDEKSASI JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>) memiliki p-ISSN 1979-6366; e-ISSN 2502-6550 yang sudah terindeks di beberapa pengindeks bereputasi, antara lain: Cross Ref, Indonesian Scientific Journal Database (ISJD), SCILIT, Sherpa/Romeo, Google Scholar, Directory Open Access Journals (DOAJ), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), British Library One Search dan Lancaster University.



**BEBESTARI PADA
JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA
(JKPI)**

1. Prof. Dr. Ir. M.F. Rahardjo (Ikhtologi, Ekologi Ikan, Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan-Institut Pertanian Bogor)
2. Prof. Dr. Ir. Endi Setiadi Kartamihardja, M. Si. (Sumber Daya dan Lingkungan-Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan)
3. Prof. Dr. Ir. Gadis Sri Haryani (Limnologi-Pusat Penelitian Limnologi, LIPI)
4. Prof. Dr. Ir. Ngurah N Wiadnyana, DEA. (Ekologi Perairan-Pusat Riset Perikanan)
5. Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumasanto, M.S. (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-Institut Pertanian Bogor)
6. Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M. Si. (Metode Penangkapan Ikan-Institut Pertanian Bogor)
7. Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc. (Teknologi Penangkapan Ikan-Institut Pertanian Bogor)
8. Prof. Dr. Ir. Wudianto, M.Sc. (Teknologi Penangkapan Ikan-Pusat Riset Perikanan)
9. Prof. Dr. Ir. Husnah, M. Phil. (Toksikologi dan Lingkungan-Pusat Riset Perikanan)
10. Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc. (Hidro Akustik Perikanan-Institut Pertanian Bogor)
11. Prof. Dr. Haryanti (Genetika dan Bioteknologi-Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan)
12. Prof. Dr. Sri Juwana (Genetika dan Bioteknologi-Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI)
13. Prof. Dr. Ir. Sonny Koeshendrajana, M.S. (Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan-Pusat Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
14. Prof. Dr. Ir. Janny Dirk Kusen, MSc. (Biologi Kelautan-Universitas Sam Ratulangi)
15. Projo Danoedoro M.Sc., Ph.D. (Remote Sensing and GIS for Land-Universitas Gajah Mada)
16. Prof. Dr. Ir. Rachman Syah, M.S. (Akuakultur-Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau)
17. Dr. Ir. Augy Syahailatua, M.Sc. (Pusat Penelitian Oseanologi-LIPI)
18. Dr. Ir. Purwito Martosubroto (Pengelolaan Perikanan-KAJISKAN)
19. Ir. Badrudin, M.Sc. (Biologi Perikanan Demersal-Balai Riset Perikanan Laut)
20. Dr. I. Gede Sedana Merta, M.Sc. (Biologi Perikanan)
21. Ir. Duto Nugroho, M.Si. (Teknologi Penangkapan Ikan-Pusat Riset Perikanan)
22. Dr. Estu Nugroho (Sumber Daya Genetik Ikan-Pusat Riset Perikanan)
23. Drs. Bambang Sumiono, M.Si. (Biologi Perikanan-Pusat Riset Perikanan)
24. Dr. Ir. Syahroma Husni Nasution, M.Sc. (Biologi Perikanan-Limnologi LIPI)
25. Dr. Ir. Mohammad Mukhlis Kamal, M. Sc. (Ikhtologi, Rekrutmen Ikan, Fisiologi Respirasi, Ikhtoplankton, Rekrutmen Ikan dan Biologi Konservasi Perairan-Institut Pertanian Bogor)
26. Dr. -Ing. Widodo Setiyo Pranowo, M.Si. (Oseanografi-Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir)
27. Dr. Nimmi Zulbainarni (Ekonomi Sumber Daya Perairan-Institut Pertanian Bogor)
28. Dra. Sri Turni Hartati, M.Sc. (Lingkungan Sumberdaya Perairan-Pusat Riset Perikanan)

UCAPAN TERIMA KASIH

Ketua Penyunting Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI) mengucapkan terima kasih kepada para Bebestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal kebijakan ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Bebestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 9 Nomor 1 Mei 2017 adalah:

1. Prof. Dr. Ir. Husnah, M. Phil. (Toksikologi dan Lingkungan-Pusat Riset Perikanan)
2. Prof. Dr. Ir. Janny Dirk Kusen, MSc. (Biologi Kelautan-Universitas Sam Ratulangi)
3. Prof. Dr. Ir. Sonny Koeshendrajana, M.S. (Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan-Pusat Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
4. Prof. Dr. Ir. Rachman Syah, M.S. (Akuakultur-Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau)
5. Ir. Duto Nugroho (Teknologi Penangkapan Ikan-Pusat Riset Perikanan)
6. Dra. Sri Turni Hartati, M.Sc. (Lingkungan Sumberdaya Perairan-Pusat Riset Perikanan)

KATA PENGANTAR

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI) di tahun 2017 memasuki Volume ke-9. Proses penerbitan jurnal ini dibiayai oleh Pusat Riset Perikanan tahun anggaran 2017. Semua naskah yang terbit telah melalui proses evaluasi oleh Dewan Penyunting dan Bebestari serta editing oleh Penyunting Pelaksana.

Pada terbitan nomor satu di Tahun 2017, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia menampilkan enam artikel hasil penelitian perikanan perairan umum daratan dan perairan laut. Enam artikel mengulas tentang: Model konseptual untuk pemecahan permasalahan pada kegiatan pemanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara; Konsep hak pengelolaan perikanan sebagai alat pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia; Tingkat partisipasi masyarakat perikanan dalam pemanfaatan potensi dua Danau di Kabupaten Simeulue; Dampak pemasangan hunian ikan buatan sebagai upaya pemulihan habitat sumberdaya ikan demersal di perairan Pantai Brebes, Jawa Tengah; Pengelolaan rajungan (*Portunus pelagicus*) yang berkelanjutan berdasarkan aspek bioekologi di Teluk Laskongko, Sulawesi Tenggara; Analisis sistem budidaya untuk mendukung kebijakan keberlanjutan produksi udang.

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi para pengambil kebijakan dan pengelola sumberdaya perikanan di Indonesia. Ketua Penyunting mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif para peneliti dari lingkup dan luar Pusat Riset Perikanan (PUSRISKAN).

Ketua Penyunting

JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA
Volume 9 Nomor 1 Mei 2017

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR BEBESTARI.....	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
KUMPULAN ABSTRAK	v-vii
Model Konseptual untuk Pemecahan Permasalahan pada Kegiatan Pemanfaatan Ikan Tuna di Nusa Tenggara <i>Oleh: Soraya Gigentika, Tri Wiji Nurani, Sugeng Hari Wisudo dan John Haluan.....</i>	1-10
Konsep Hak Pengelolaan Perikanan sebagai Alat Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia <i>Oleh: Abdul Halim, Budy Wiryawan, Neil R Loneragan, M. Fedi A. Sondita, Adrian Hordyk., Dedi S Adhuri, Tukul R. Adi dan Luky Adrianto.....</i>	11-20
Tingkat Partisipasi Masyarakat Perikanan dalam Pemanfaatan Potensi Dua Danau di Kabupaten Simeulue <i>Oleh: Armen Zulham.....</i>	21-30
Dampak Pemasangan Hunian Ikan Buatan sebagai Upaya Pemulihan Habitat Sumberdaya Ikan Demersal di Perairan Pantai Brebes, Jawa Tengah <i>Oleh: R. Thomas Mahulette, Anthony S. Panggabean, Duto Nugroho dan Nasrul Rizal A. Lubis.....</i>	31-40
Pengelolaan Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i>) yang Berkelanjutan Berdasarkan Aspek Bioekologi di Teluk Laskongko, Sulawesi Tenggara <i>Oleh: Abdul Hamid, Yusli Wardiatno, Djamar T.F. Lumban Batu dan Ety Riani.....</i>	41-50
Analisis Sistem Budidaya untuk Mendukung Kebijakan Keberlanjutan Produksi Udang <i>Oleh: Wartono Hadie dan Lies Emmawati Hadie.....</i>	51-60
PEDOMAN PENULISAN.....	App. 61
SERTIFIKAT AKREDITASI.....	App. 62

JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA
Volume 9 No.1 Mei 2017

KUMPULAN ABSTRAK

MODEL KONSEPTUAL UNTUK PEMECAHAN PERMASALAHAN PADA KEGIATAN PEMANFAATAN IKAN TUNA DI NUSA TENGGARA

Soraya Gigentika
JKPI Mei 2017, Vol. 9 No 1, Hal: 1-10
e-mail: sorayapsp43@yahoo.co.id

ABSTRAK

Wilayah perairan sekitar Nusa Tenggara merupakan bagian dari wilayah perairan yang menjadi lokasi ruaya ikan tuna sehingga memberikan peluang terjadinya persaingan dalam pemanfaatan ikan tuna sehingga dalam jangka panjang cenderung menimbulkan permasalahan di kawasan ini. Tujuan penelitian ini adalah mendefinisikan permasalahan pada pemanfaatan sumberdaya ikan tuna di Nusa Tenggara dan membuat model konseptual untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pada kegiatan penangkapan ikan tuna di Nusa Tenggara adalah menurunnya produktivitas unit penangkapan ikan tuna dan penangkapan ikan tuna yang belum matang gonad atau masih fase juvenile/yuwana. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan model konseptual untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya ikan tuna dan model konseptual untuk pembatasan penangkapan yuwana ikan tuna.

Kata Kunci: Ikan tuna; model konseptual; Nusa Tenggara; pemanfaatan

KONSEP HAK PENGELOLAAN PERIKANAN SEBAGAI ALAT PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Abdul Halim
JKPI Mei 2017, Vol. 9 No 1, Hal: 11-20
e-mail: halimabdul1213@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan perikanan di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi motivasi perlombaan menangkap ikan. Kondisi yang dikenal sebagai *open access* ini, perlu segera diatasi untuk mencegah berlanjutnya tangkap lebih. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep Hak Pengelolaan Perikanan (HPP), yang berpotensi diterapkan sebagai alat pengelolaan perikanan termasuk yang berada dekat pantai di Indonesia untuk mengatasi masalah perikanan *open access*. Metoda *qualitative content analysis* yang ditriangulasi melalui diskusi kelompok terfokus melibatkan para ahli, pengambil keputusan dan praktisi, digunakan untuk menjelaskan konsep HPP di

Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan HPP melegitimasi entitas pemegang HPP mengamankan kesempatannya menangkap ikan secara eksklusif dengan mencegah pihak lain mengeksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan. Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa HPP yang diintegrasikan kedalam kerangka rencana pengelolaan perikanan, bisa mengatasi permasalahan perikanan *open access*, karena mampu meredam motivasi dan tindakan nelayan dalam melakukan perlombaan menangkap ikan. Penggunaan ilmu pengetahuan kontemporer dan kearifan lokal dalam menentukan batasan tangkapan lestari dibarengi dengan upaya pemantauan dan penegakan aturan menentukan keberhasilan penerapannya. Terlihat juga bahwa praktek tradisional seperti Sasi di Maluku yang dimungkinkan oleh adanya pengakuan hak ulayat 'petuanan laut' merupakan konsep pemanfaatan sumber daya alam secara eksklusif yang selaras dengan esensi dari HPP. Direkomendasikan agar model pengelolaan berbasis HPP ini dilegitimasi kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Hak pengelolaan perikanan; perikanan berkelanjutan; perikanan *open access*; petuanan laut; Sasi.

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PERIKANAN DALAM PEMANFAATAN POTENSI DUA DANAU DI KABUPATEN SIMEULUE

Armen Zulham
JKPI Mei 2017, Vol. 9 No 1, Hal: 21-30
e-mail: keude_bing@yahoo.co.id

ABSTRAK

Danau Lauo dan Danau Lauik Tawar adalah dua danau di Simeulue yang informasinya belum tersedia secara memadai. Akibatnya program pembangunan untuk masyarakat disekitar danau itu belum dapat diwujudkan. Tulisan ini, mempelajari tingkat partisipasi pemangku kepentingan di Desa Amabaan dan Desa Bulu Hadek dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kedua danau tersebut. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Nopember 2015 dengan mewawancarai secara acak 20 responden di Desa Amabaan dan 20 responden di Desa Bulu Hadek. Pengumpulan data kedua dilakukan pada Oktober 2016 melalui diskusi dengan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat memanfaatkan potensi danau, belum mencapai tingkat partisipasi mandiri. Tingkat partisipasi pedagang hanya pada tingkat partisipasi informatif (di Desa Bulu Hadek) dan tingkat partisipasi interaktif (di

Desa Amabaan). Tingkat partisipasi masyarakat membiayai usaha di Amabaan adalah tingkat partisipasi interaktif dan di Desa Bulu Hadek adalah tingkat partisipasi insentif. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemupukan modal melalui tabungan adalah tingkat partisipasi pasif. Tulisan ini merekomendasikan, untuk peningkatan pemanfaatan potensi danau perlu dilakukan intervensi pemerintah dengan membentuk pasar informal dan mengembangkan inkubator bisnis pada kedua lokasi tersebut. Dampak dari rekomendasi itu akan mendorong perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat membuat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi danau, perdagangan dan pemupukan modal menuju tingkat partisipasi mandiri.

Kata Kunci: Danau; mata pencaharian; perdagangan; tingkat partisipasi; Simeulue

DAMPAK PEMASANGAN HUNIAN IKAN BUATAN SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HABITAT SUMBERDAYA IKAN DEMERSAL DI PERAIRAN PANTAI BREBES, JAWA TENGAH

R. Thomas Mahulette
JKPI Mei 2017, Vol. 9 No 1, Hal: 31-40
e-mail: rijejan0410@gmail.com

ABSTRAK

Teknologi hunian ikan buatan (*Fish shelter*) telah banyak digunakan di berbagai perairan dan telah berkontribusi pada perbaikan kualitas dan kesehatan habitat pada kawasan yang telah terdegradasi akibat faktor-faktor antropogenik. Perairan pantai Brebes merupakan kawasan dengan aktivitas perikanan padat tangkap yang telah beroperasi sejak lama. Pada tahun 2013–2014 telah dilakukan upaya penerapan teknologi hunian ikan buatan melalui penenggelaman sejumlah modul bangunan bawah air di kawasan tersebut. Tujuan utama penerapan teknologi tersebut untuk memperbaiki habitat ikan demersal yang terdegradasi oleh aktivitas perikanan tangkap yang telah berjalan. Desain dan konstruksi hunian ikan buatan mengikuti bentuk kubus terbuat dari beton berongga dan disusun bertingkat dalam air berbentuk piramida. Diharapkan bangunan yang dibentuk akan menjadi habitat buatan untuk memperbaiki ketersediaan dan kelimpahan ikan di sekitar kawasan tersebut. Hasil pengamatan secara kualitatif selama 1 tahun penenggelaman memberikan informasi bahwa terjadi peningkatan kelimpahan ikan demersal (kakap dan kerapu) berukuran 20-30 cm yang dibuktikan dengan data hasil tangkapan nelayan yang beroperasi disekitar kawasan tersebut. Manfaat lain

adalah mulai berkembangnya perikanan rekreasi dengan alat tangkap pancing. Tulisan ini disusun sebagai bagian dari awal keberhasilan penenggelaman bangunan bawah air sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki habitat di kawasan padat tangkap. Upaya mengubah pola pemanfaatan sumberdaya menjadi lebih bertanggung jawab telah disosialisasikan. Kesejahteraan masyarakat pesisir dalam jangka panjang sangat perlu didukung oleh pengelolaan dan kebijakan pemanfaatan ekosistem dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Hunian ikan buatan; habitat; sumberdaya ikan; Brebes; Jawa Tengah

PENGELOLAAN RAJUNGAN (*Portunus pelagicus*) YANG BERKELANJUTAN BERDASARKAN ASPEK BIOEKOLOGI DI TELUK LASONGKO, SULAWESI TENGGARA

Abdul Hamid
JKPI Mei 2017, Vol. 9 No 1, Hal: 41-50
e-mail: abdhamid_lamun@yahoo.com

ABSTRAK

Status perikanan rajungan di Teluk Lasongko saat ini telah *overfishing* dan kritis, sehingga perlu dikelola dengan baik. Makalah ini bertujuan untuk menentukan potensi dan permasalahan keberlanjutan pemanfaatan rajungan serta menyusun strategi pengelolaan rajungan di Teluk Lasongko berdasarkan pada aspek bioekologi. Data ekobiologi dikumpulkan sejak tahun 2006, dan 2013 sampai 2014 di Teluk Lasongko. Hasil penelitian menunjukkan potensi dan keberlanjutan pemanfaatan perikanan rajungan di Teluk Lasongko tergolong tinggi. Permasalahan yang timbul yang mengancam keberlanjutan rajungan adalah *overfishing*, penangkapan rajungan berukuran kecil dan rajungan betina *ovigerous*, daerah penangkapan rajungan yang tidak merata, dan kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan. Beberapa strategi pengelolaan harus dilakukan untuk mendukung dan memastikan pengelolaan berkelanjutan rajungan di Teluk Lasongko, yaitu penetapan ukuran terkecil yang boleh ditangkap (untuk jantan >109,8 mm-CW dan betina >115,7 mm-CW), pelarangan penangkapan rajungan betina *ovigerous*, dan mengurangi upaya penangkapan dengan bubu sampai 50%. Selain itu, *restocking* dan pembentukan suaka rajungan juga harus dilakukan.

Kata Kunci: Crustacea; pemanfaatan berkelanjutan; pengelolaan pesisir; perikanan rajungan; Portunidae

ANALISIS SISTEM BUDIDAYA UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN PRODUKSI UDANG

Wartono Hadie
JKPI Mei 2017, Vol. 9 No 1, Hal: 51-60
e-mail: emmalitbang@gmail.com

ABSTRAK

Volume ekspor udang Indonesia masih tergolong fluktuatif, namun komoditas udang tetap menjadi salah satu komoditas andalan ekspor perikanan Indonesia yang meliputi 40% hasil ekspor perikanan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggambarkan status keberlanjutan sistem budidaya udang dan merumuskan opsi rekomendasi kebijakannya. Analisis secara deskriptif dan analisis ordinasi Rap-SISDITA yang berbasis metode dimensional scalling digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan beberapa sistem budidaya udang vaname yang berkembang di masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1). Dalam mendukung Inpres Nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan industrialisasi perikanan, maka sub sektor budidaya perlu mengimplementasikan hasil penelitian untuk

mendukung keberlanjutan produksi udang vaname. Dimensi yang perlu diperhatikan adalah kebijakan pemerintah, teknologi budidaya, dan nilai ekonomi; 2). Membentuk program budidaya udang vaname berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal itu bisa dicapai melalui regulasi dengan penerapan model teknologi budidaya udang vaname yang ideal, berbasis lingkungan yang sehat, teknologi tepat guna, dan berorientasi pasar. Kebijakan pemerintah perlu berfokus pada pemberdayaan petambak pada berbagai sistem budidaya dengan dimensi pendukungnya yang tepat. Regulasi ini dapat ditetapkan oleh pihak Pemerintah beserta Pemerintah Daerah; 3). Pemanfaatan sentra budidaya udang vaname secara terintegrasi melalui diseminasi teknologi yang menjangkau daerah-daerah yang berpotensi untuk budidaya udang vaname dan melalui multimedia yang lebih luas; 4). Pemerintah Pusat menugaskan lembaga penelitian, perguruan tinggi, penyuluh perikanan, produsen benih, pengusaha pakan, dan kelompok pembudidaya untuk mengambil langkah persiapan hingga pelaksanaan program.

Kata Kunci: Kebijakan; keberlanjutan; sistem budidaya; udang, multi dimensional scalling